

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Proses pembangunan ekonomi di suatu daerah merupakan salah satu cara untuk meningkatkan taraf hidup atau kesejahteraan masyarakat yang terus diupayakan oleh pemerintah secara berkelanjutan. Keberhasilan pemerintah dalam melaksanakan proses pembangunan wilayah tercermin dari tingkat kesejahteraan masyarakat baik dari segi ekonomi maupun sosial. Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu faktor penting untuk menilai perekonomian suatu negara. Dengan melihat pertumbuhan ekonomi kinerja perekonomian suatu negara dapat diketahui dan dapat dilihat sejauh mana aktivitas perekonomian suatu negara. Pertumbuhan ekonomi yang baik dapat memicu peningkatan produksi barang dan jasa, membuka lapangan pekerjaan, serta meningkatkan pendapatan dan daya beli masyarakat. Dalam melaksanakan proses pembangunan ekonomi akan timbul berbagai tantangan dan permasalahan diantaranya adalah kemiskinan.

Kemiskinan adalah salah satu permasalahan yang sangat rumit dipengaruhi oleh banyak hal yang berkaitan antara satu dengan yang lain. Kemiskinan merupakan permasalahan umum bagi setiap negara, khususnya bagi negara berkembang seperti Indonesia, mengatasi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan rakyat merupakan tujuan dari pembangunan. Berbagai teori maupun

kebijakan-kebijakan mengenai kemiskinan telah dikaji dan diimplementasikan agar dapat mengatasi kemiskinan namun tidak semuanya membuahkan hasil yang optimal (Arifin, 2020). Permasalahan kemiskinan tidak cuman menjadi permasalahan nasional saja, namun menyebar ke setiap wilayah di seluruh Indonesia. Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan salah satu provinsi yang penduduk miskinnya masih tergolong tinggi di Indonesia. Jika dibandingkan dengan tingkat kemiskinan nasional, angka kemiskinan Daerah Istimewa Yogyakarta melampaui angka kemiskinan nasional. Tingkat kemiskinan Indonesia pada tahun 2021 sebesar 9,71% sedangkan tingkat kemiskinan D. I. Yogyakarta pada tahun 2021 sebesar 11,91%. Dengan tingkat kemiskinan yang lebih tinggi dari nasional, dengan permasalahan ini Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta harus berupaya untuk menyelesaikan masalah kemiskinan.

Peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat menjadi prioritas pemerintah pusat maupun daerah, termasuk Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta. Langkah pertama untuk memulai proses pembangunan adalah menyiapkan rencana pembangunan yang relevan. Hal ini dirancang agar langkah-langkah untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan dapat dilaksanakan dengan lancar dan dapat mengurangi hambatan. Dengan demikian peningkatan kesejahteraan masyarakat akan dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat Daerah Istimewa Yogyakarta (Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, 2022). Provinsi D.I. Yogyakarta merupakan Provinsi yang menempati urutan nomor satu sebagai daerah dengan tingkat kemiskinan paling tinggi dibandingkan dengan Provinsi lain di Pulau Jawa. Selama tahun 2012 hingga

tahun 2021 Daerah Istimewa Yogyakarta memiliki angka kemiskinan yang tinggi dengan rata-rata 13,2%.

Tabel 1. 1
Persentase Penduduk Miskin di Pulau Jawa Tahun 2012-2021

Provinsi	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
DKI JAKARTA	3,7	3,72	4,09	3,61	3,75	3,78	3,55	3,42	4,69	4,67
JAWA BARAT	9,88	9,61	9,18	9,57	8,77	7,83	7,25	6,82	8,43	7,97
JAWA TENGAH	14,98	14,44	13,58	13,32	13,19	12,23	11,19	10,58	11,84	11,25
DI YOGYAKARTA	15,88	15,03	14,55	13,16	13,1	12,36	11,81	11,44	12,8	11,91
JAWA TIMUR	13,08	12,73	12,28	12,28	11,85	11,2	10,85	10,2	11,46	10,59
BANTEN	5,71	5,89	5,51	5,75	5,36	5,59	5,25	4,94	6,63	6,5

Sumber : Badan Pusat Statistik

Berdasarkan Tabel 1.1 mengenai Persentase Penduduk Miskin Provinsi di Pulau Jawa dalam kurun waktu 2012-2021, Provinsi dengan persentase penduduk miskin tertinggi adalah Provinsi D. I. Yogyakarta dengan persentase jumlah penduduk miskin sebesar 11,91% pada tahun 2021. Secara keseluruhan selama periode 2012-2021 mengalami tren penurunan. Persentase penduduk miskin dari tahun 2012-2021 turun sebesar 3,97%, dengan tingkat kemiskinan pada tahun 2012 sebesar 15,88% menjadi 11,91% pada tahun 2021.

Tinggi atau rendahnya tingkat kemiskinan dalam suatu wilayah dapat disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya faktor pendidikan, faktor kesehatan, tingkat pendapatan, lokasi geografis dan lingkungan yang mana saling memiliki pengaruh antara satu dengan yang lainnya (Fadila & Marwan, 2020). Tingkat pendidikan yang tinggi akan melahirkan sebuah keahlian dan pengetahuan pada

seseorang yang dapat menjadi bekal bersaing dalam dunia kerja, semakin tinggi pendidikan maka potensi pendapatannya semakin besar juga. Sebaliknya jika individu mendapatkan tingkat pendidikan yang rendah atau bahkan tidak mendapatkan pendidikan sama sekali maka akan sulit bersaing dalam dunia kerja, hal ini dapat mengakibatkan pendapatan yang diperoleh menjadi lebih rendah dan dapat menimbulkan kemiskinan. D. I. Yogyakarta merupakan provinsi yang memiliki masyarakat berpendidikan yang cukup banyak, hal ini dapat dibuktikan secara statistik Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan provinsi yang memiliki angka harapan lama sekolah tertinggi diantara provinsi lain di Indonesia (Badan Pusat Statistik, 2022) namun melihat faktanya meskipun Daerah Istimewa Yogyakarta memiliki banyak masyarakat yang berpendidikan tetapi juga diikuti dengan tingginya tingkat kemiskinan.

Kemiskinan tidak hanya mengenai kemampuan daya beli, konsumsi atau pendapatan tetapi mendefinisikannya sebagai multidimensi seperti terbatasnya akses ke pendidikan, kualitas hidup, kesehatan dan kebebasan terhadap akses ekonomi (Suryani et al., 2019). Masyarakat miskin lebih banyak mengeluarkan pendapatan mereka untuk memenuhi kebutuhan makanan sehingga untuk kebutuhan non makanan sering tidak terpenuhi. Masyarakat yang memiliki pendapatan tinggi akan memiliki ruang lebih untuk investasi, hiburan, pendidikan, kesehatan dan pengeluaran lainnya yang mendukung tingkat kesejahteraan. Pengeluaran masyarakat yang tinggi pada sektor pendidikan dan/atau kesehatan akan memberikan dampak bagi kesejahteraan masyarakat yang kemudian akan meningkatkan taraf hidupnya (Wulandari & Pratama, 2022). Kesenjangan antara masyarakat miskin dengan masyarakat yang berkecukupan membuat timbulnya

perbedaan karena rendahnya akses terhadap sumber daya yang dapat mendukung taraf hidup, oleh karena itu perlunya tangan pemerintah untuk membantu masyarakat miskin menggunakan dan menikmati fasilitas dan sarana publik yang setara untuk mengurangi kemiskinan.

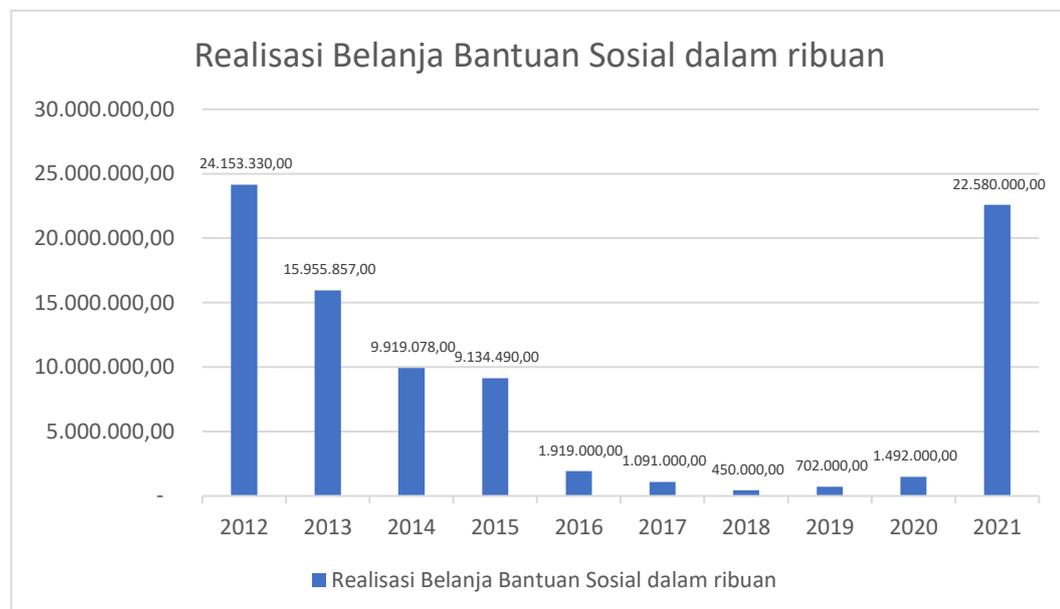
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pada kenyataannya merupakan alat utama dalam kebijakan publik yang penting untuk meningkatkan fasilitas dan kesejahteraan masyarakat. APBD juga digunakan untuk menetapkan besaran pendapatan dan pengeluaran, serta membantu dalam pengambilan keputusan dan perencanaan pembangunan (Lamaya & Mei, 2021). Selain menjalankan berbagai haknya pemerintah juga memiliki tanggung jawab yang harus dipenuhi kepada masyarakat demi kepentingan publik. Tanggungan yang harus dipenuhi pemerintah dapat berupa peningkatan kualitas pelayanan dan pembangunan fasilitas publik. Menurut (Melati et al., 2021) belanja kesehatan yang dilakukan oleh pemerintah secara signifikan mengurangi tingkat kemiskinan.

Beberapa indikator untuk mengukur tingkat kemiskinan adalah dilihat dari kemudahan berbagai akses. Diantaranya akses fasilitas dan kualitas pelayanan medis, jarak tempuh ke fasilitas medis, tersedianya tempat pembelajaran yang mumpuni dan harga yang harus dibayar masyarakat untuk memperolehnya. Dengan keseriusan peran pemerintah dalam mengatasi masalah disektor pendidikan dan kesehatan melalui alokasi pengeluaran pemerintah yang maksimal dan tepat sasaran maka akan dapat membantu upaya penurunan kemiskinan.

Alokasi belanja pemerintah memiliki hubungan yang kuat dengan peningkatan kualitas masyarakat terutama dalam hal upaya mengurangi

kemiskinan (Riva et al., 2021). Belanja semestinya menitikberatkan kepentingan masyarakat, yang direalisasikan dalam bentuk peningkatan pelayanan publik sarana pendidikan, kesehatan dan jaminan sosial. Dalam kegiatan penyelenggaraan pemerintahan daerah, salah satu wujud usaha yang dilaksanakan pemerintah ditingkat daerah untuk mengurangi kemiskinan mewujudkan kesejahteraan umum salah satunya adalah penyelenggaraan bantuan sosial.

Gambar 1. 1
Realisasi Belanja Bantuan Sosial Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
2012-2021



Sumber : Badan Pusat Statistik

Data yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik pada Gambar 1.1 menunjukkan bahwa bantuan sosial masih menjadi alat Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta untuk mencegah masyarakat dari risiko sosial dan atau mengembangkan kesejahteraan masyarakat. terlihat pada tahun 2020 jumlah realisasi belanja bantuan sosial Daerah Istimewa Yogyakarta senilai Rp. 1.492.00.000,00 kemudian karena akibat dari pandemi covid-19 bantuan sosial

yang dikeluarkan Pemerintah DIY naik sebesar Rp. 22.580.000.000,00 pada tahun 2021. Sejumlah penelitian terdahulu ditemukan perbedaan hasil mengenai bantuan sosial yang dikeluarkan pemerintah terhadap kemiskinan. Menurut (Nurainah, 2019) bantuan sosial yang tepat sasaran oleh pemerintah secara signifikan dapat mengurangi kemiskinan.

Dilihat dari permasalahan yang telah diterangkan diatas, selama tahun 2012 hingga 2021 Provinsi D. I. Yogyakarta menempati urutan nomor satu sebagai daerah dengan tingkat kemiskinan yang paling tinggi jika dibandingkan dengan Provinsi lain di Pulau Jawa padahal Daerah Istimewa Yogyakarta memiliki masyarakat berpendidikan yang banyak. Terhalangnya akses bagi kelompok tertentu dalam masyarakat dapat menyebabkan kemiskinan, oleh karena itu dibutuhkannya peran pemerintah melalui pengeluaran pada urusan pendidikan, kesehatan dan bantuan sosial agar masyarakat merasakan pelayanan publik yang merata dan dapat mengurangi kemiskinan. Maka dari itu peneliti tertarik untuk mengambil judul penelitian **“Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Bidang Pendidikan, Kesehatan dan Bantuan Sosial terhadap Kemiskinan Daerah Istimewa Yogyakarta”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, berikut ini merupakan masalah-masalah yang dirumuskan pada penelitian ini :

1. Apakah Pengeluaran Pemerintah pada Bidang Pendidikan memiliki pengaruh terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta?
2. Apakah Pengeluaran Pemerintah pada Bidang Kesehatan memiliki pengaruh terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta?
3. Apakah Jumlah Belanja Bantuan Sosial Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta memiliki pengaruh terhadap tingkat kemiskinan?

1.3 Tujuan Penelitian

Merujuk pada latar belakang yang telah dijelaskan dan rumusan masalah di atas, maka penelitian ini memiliki tujuan yang ingin dicapai :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis adanya pengaruh Pengeluaran Pemerintah pada Bidang Pendidikan terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis adanya pengaruh Pengeluaran Pemerintah pada Bidang Kesehatan terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis adanya pengaruh Belanja Bantuan Sosial terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

1.4 Ruang Lingkup Penelitian

Merujuk pada latar belakang yang telah dijelaskan sebelumnya, maka dalam penelitian ini terdapat batasan penelitian agar penelitian lebih terarah. Sehingga peneliti lebih fokus pada pengaruh pengeluaran pemerintah bidang pendidikan, kesehatan dan belanja bantuan sosial terhadap tingkat kemiskinan yang ada di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

1.5 Manfaat Penelitian

1. Pada penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan materi pada bidang ekonomi terkait dengan Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Bidang Pendidikan, Kesehatan dan Belanja Bantuan Sosial terhadap Tingkat Kemiskinan Daerah Istimewa Yogyakarta.
2. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan pertimbangan bagi pemerintah khususnya pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta dalam menentukan kebijakan ekonomi agar dapat menurunkan tingkat kemiskinan dimasa depan.
3. Dengan adanya penelitian ini diharapkan menjadi sumber informasi dan pustaka bagi penelitian berikutnya.
4. Diharapkan hasil penulisan ini memberikan manfaat, wawasan dan meningkatkan kualitas penulisan karya ilmiah yang baik khususnya oleh penulis, serta sebagai bekal di kemudian hari di masyarakat.